

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Program Keluarga Harapan di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edwards III khususnya faktor-faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi.

Berlandaskan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi sebagai berikut :

- 1) Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Program Keluarga Harapan di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman berlangsung optimal melalui pendekatan faktor-faktor implementasi kebijakan yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi.
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pemerintah dalam Program Keluarga Harapan di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman dapat diatasi dengan pemenuhan tuntutan dan kebutuhan yang menunjang implementasi kebijakan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman tentang Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2014 optimal, dengan indikasi-indikasi (1) Sosialisasi kebijakan Program Keluarga Harapan kurang sampai pada masyarakat bawah, (2) Masih rendahnya pengetahuan yang dimiliki sebagian pihak sekolah dalam memahami bantuan Program Keluarga Harapan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin yang memiliki anak yang masih sekolah ditingkat SD atau SMP, karena ada sikap membedakan yang dilakukan sebagian pihak sekolah atas bantuan lainnya yang seharusnya diterima oleh anak dari kalangan miskin, (3) Kurangnya komunikasi antara aparat pelaksana dengan masyarakat. Pada saat pelaksanaan mufakat membahas masalah PKH hanya dari lembaga-lembaga nagari yang diundang sementara dari kalangan masyarakat tidak diberi tahu, (4) Kurangnya koordinasi aparat pelaksana dengan unit-unit lain dalam pelaksanaan PKH.

